



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT

SKRIPSI



**SASMITA TAMARO
07 151 073**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.”**

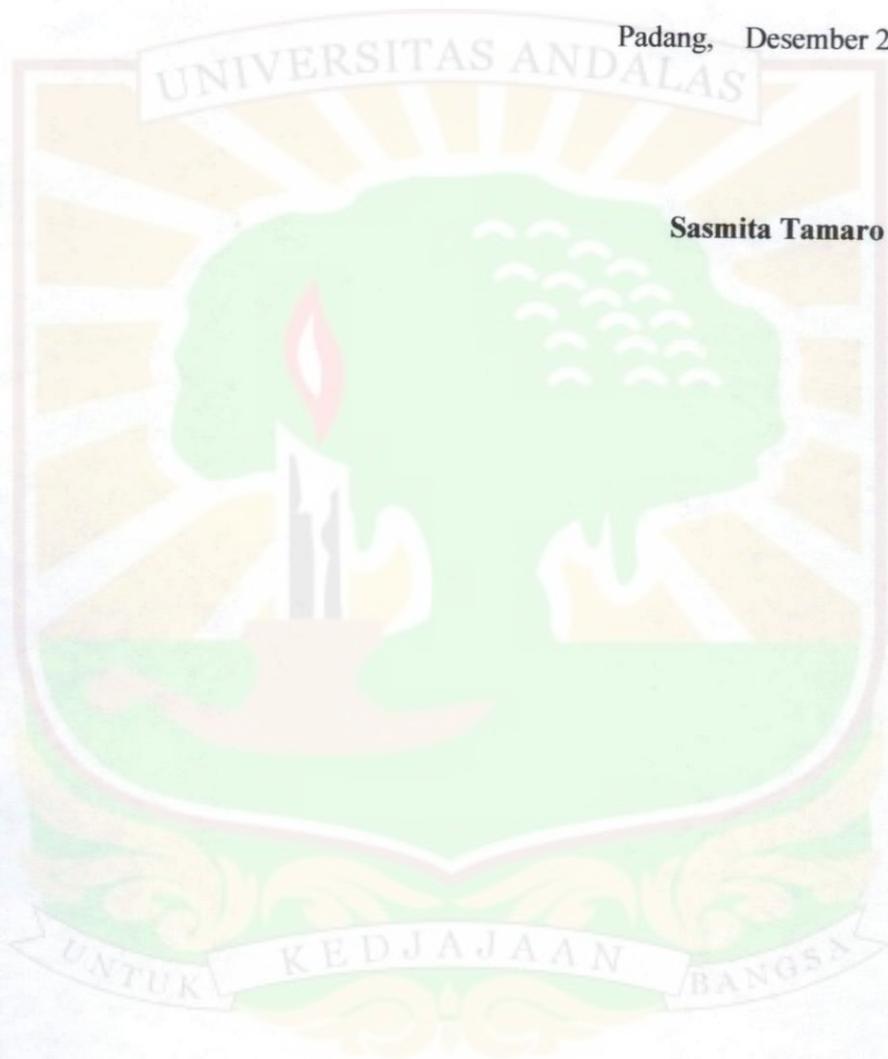
Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan – dorongan yang memberikan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Papa dan Mama tercinta **Pdt. A. Lumban Raja dan P. Br. Tobing** atas pengorbanan, nasehat, doa, dan dukungan penuh kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

5. **Bapak Lukman, SE,M.Si**, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk, serta saran – saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Bapak Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si** dan **Ibu Dra. Laksmi Dewi, M.Si**, selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar hasil sekaligus memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran – saran yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/ Sekretariat/ Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama penulis kuliah hingga selesai studi ini.
9. Keluarga besar tercinta : Abang dan Kakak Yolanda, Bang Rama, Bang Sefrin, Uda dan Nanguda Pudan, keponakanku tersayang Yolanda dan Callista, beserta seluruh keluargaku yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu - persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Teman – teman di Jurusan Ilmu Ekonomi 07 : Ayoe, Tya, JieJie, Inel, Lusi, Ina, k'Maya, Meng, dan teman – teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu - persatu, terima kasih buat kebersamaannya selama ini sobat. Tetap semangat yaaa... ^_^

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis masih memerlukan masukan dan saran - saran guna perbaikan selanjutnya, dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Padang, Desember 2011



Sasmita Tamaro

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.1. Teori Pertumbuhan Harrod - Domar.....	11
2.1.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik	12
2.1.3. Teori Pertumbuhan Schumpeter	13
2.1.4. Teori Pertumbuhan Rostow	14
2.2. Pengeluaran Pemerintah	
2.2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.2.1.1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro	14
2.2.1.2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro	15
2.2.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	18
2.2.3. Peran dan Campur Tangan dalam Perekonomian	21
2.3. Konsep dan Teori Investasi Swasta	23
2.5. Penelitian Terdahulu.....	25
2.6. Hipotesis Penelitian	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	28
3.2 Metode Pembentukan Model	28
3.3 Definisi Operasional Variabel	29
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data	30
3.5. Pengujian Model Asumsi Klasik	
3.5.1. Uji Normalitas	30
3.5.2. Uji Multikolinearitas	31
3.5.3. Uji Autokorelasi	31
3.5.4. Uji Heterokedastisitas	32
3.6. Metode Pengujian Statistik	
3.6.1. Pengujian Koefisien Regresi secara serentak (uji F)	33
3.6.2. Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t)	34
3.6.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	35

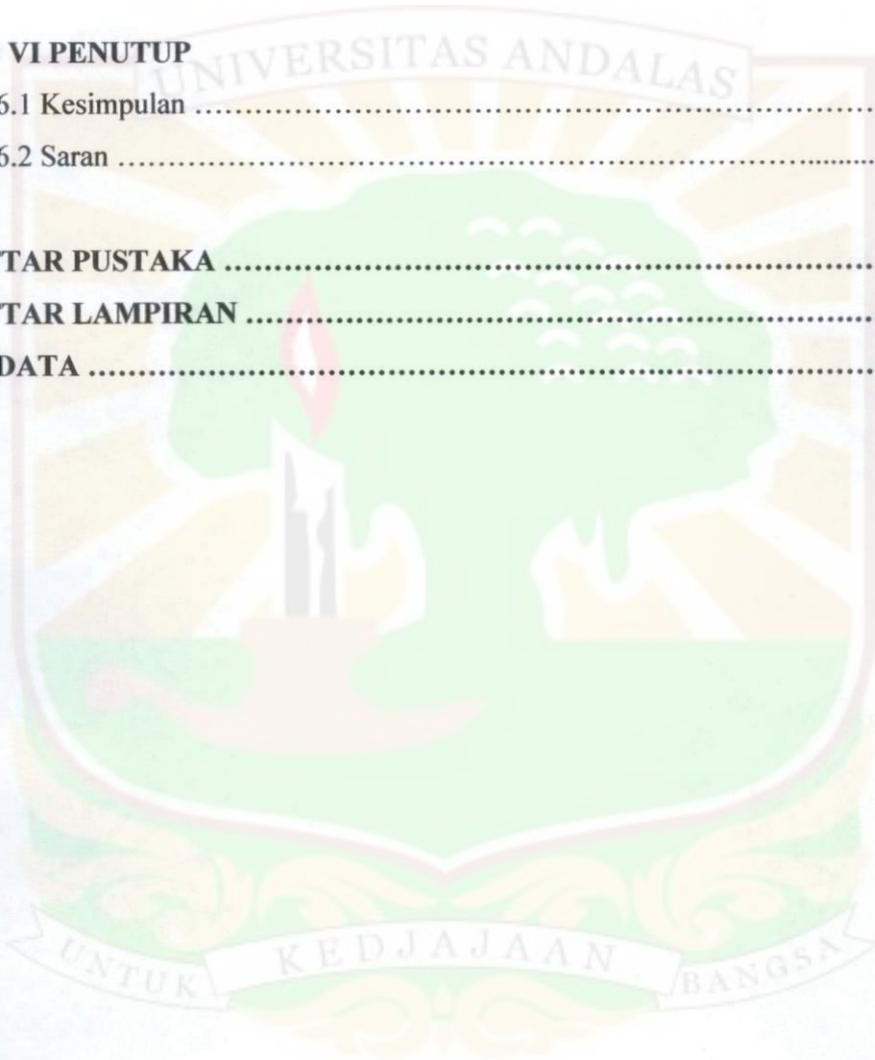
BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	
4.1.1. Luas dan Kondisi Geografis	36
4.1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk	38
4.2 Deskripsi Variabel	
4.2.1. Perkembangan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat	40
4.2.2. Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Pusat	44
4.2.3. Perkembangan Investasi Swasta di Sumatera Barat	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

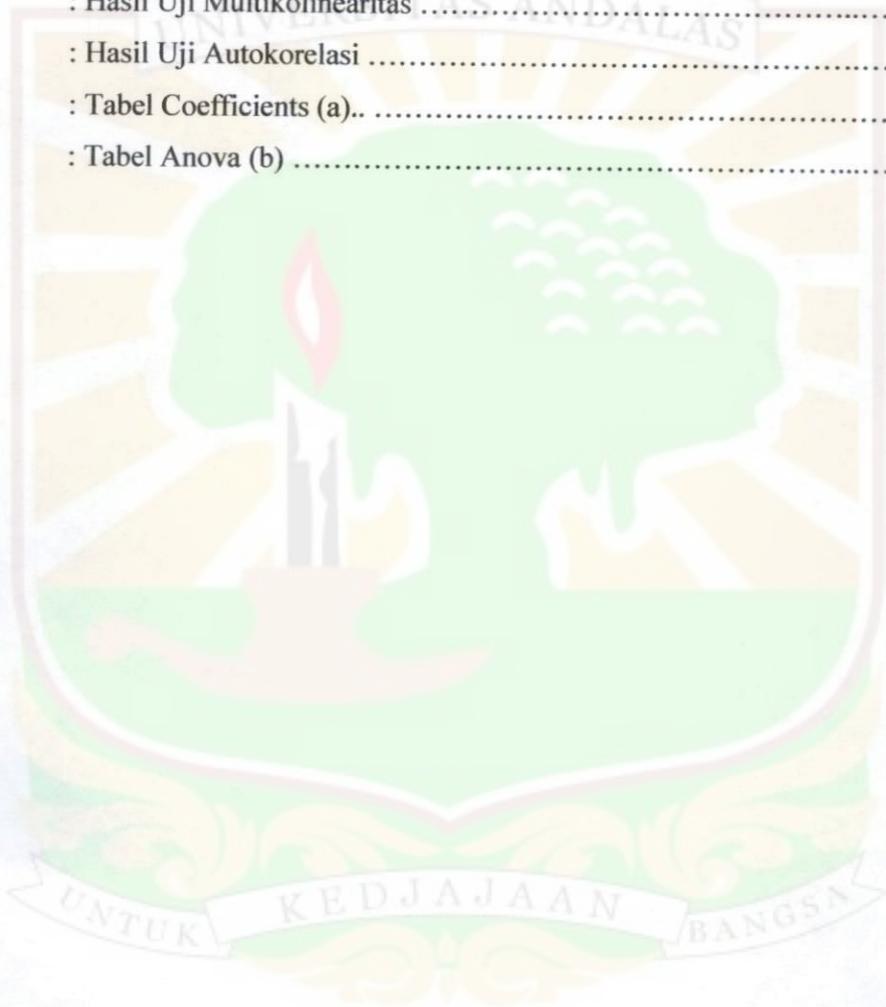
5.1 Deskripsi Data	49
5.2 Analisis Hasil Regresi	50
5.2.1 Uji Asumsi Klasik	
5.2.1.1 Uji Normalitas	50
5.2.1.2 Uji Multikolinearitas	51
5.2.1.3 Uji Autokorelasi	52
5.2.1.4 Uji Heterokedastisitas	53

5.2.2 Pengujian Hipotesis	
5.2.2.1 Uji F	57
5.2.2.2 Uji t	58
5.2.2.3 Uji Koefisien Determinasi	60
5.3 Analisis Ekonomi	
5.3.1 Pengeluaran Pemerintah	61
5.3.2 Investasi Swasta	62
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BIODATA	ix



DAFTAR TABEL

4.1	: Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Barat tahun 1995 – 2009	39
4.2	: Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1995 – 2009	41
4.3	: Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1995 – 2009	42
5.1	: Data Penelitian	50
5.2	: Hasil Uji Multikolinearitas	51
5.3	: Hasil Uji Autokorelasi	53
5.4	: Tabel Coefficients (a)..	55
5.5	: Tabel Anova (b)	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	17
Gambar 5.1 : Hasil Uji Normalitas	51
Gambar 5.2 : Hasil Uji Heterokedastisitas	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus – menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama – sama dan berkesinambungan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Budiono, 1992). Ada empat faktor yang sebagai sumber – sumber pertumbuhan ekonomi, yakni (1) sumber daya manusia ; (2) sumber daya alam ; (3) pembentukan modal ; dan (4) perkembangan teknologi.

Perekonomian Sumatera Barat mulai bergerak positif setelah mengalami tekanan akibat dampak gempa bumi yang terjadi tahun 2009 yang melanda kawasan tersebut. Dampak dari bencana ini dapat terlihat pada triwulan IV - 2009, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,90 %. Namun demikian pertumbuhan ini relatif lebih baik dibandingkan pada perhitungan sebelumnya yang diperkirakan akan

terjadi kontraksi 0,14 %. Secara keseluruhan, pada tahun 2009 perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,16 % lebih baik dibandingkan perkiraan semula sebesar 3,92 %. Kontribusi utama perekonomian Sumatera Barat hingga pada tahun 2010 ini masih didukung oleh tiga sektor utama, yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa – jasa. Ketiga sektor tersebut menyumbang perekonomian Sumatera Barat lebih dari 58 %, dimana sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 23,75 %, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 17,99 %, dan sektor jasa – jasa yang berkontribusi sebesar 15,95 %. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian masih tetap dominan dan diperkirakan akan tetap menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat di masa yang akan datang dimana sebagian besar penduduk Sumatera Barat menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut yang kemudian diikuti dengan sektor perdagangan. Hal ini juga didukung oleh adanya pembangunan mall/ plaza dan pusat perdagangan, baik yang baru maupun pengembangan yang tersebar di propinsi Sumatera Barat.

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Keberadaan APBD yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif, dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi- fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Adapun salah satu tujuan dari pembangunan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Adanya pemenuhan kebutuhan dasar itu akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Alokasi anggaran tidak memberikan arah perubahan besar bagi terciptanya suatu nuansa keadilan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital dalam membangun suatu daerah yang maju dan berkembang. Dalam kondisi yang demikian pemerintah melalui kebijakan anggaran pemerintah pusat perlu memberikan perlindungan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kebijakan dimaksud dilakukan dengan mengarahkan alokasi belanja aparatur yang ditujukan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pengeluaran pelayanan publik diarahkan untuk program proyek prasarana sosial dan program pemulihan kegiatan perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga sangat diperlukan adanya investasi, dimana investasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi memungkinkan masyarakat di suatu

daerah secara terus – menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatannya.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang – barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang – barang dan jasa – jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2001). Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya sarana dan prasarana terutama dana yang memadai. Dalam hal ini, peran investasi sangat diperlukan karena dapat menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan investasi. Tingkat pengeluaran pemerintah dan investasi merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dipengaruhi oleh modal, alam, dan teknologi. Semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah dan investasi di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 1.1 :

Perkembangan Nilai PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Nilai Investasi Swasta di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009 (000)

Tahun	PDRB	Pengeluaran Pemerintah	Investasi Swasta
2006	30.949.945,100	6.782.311,880	313.713,360
2007	32.912.968,590	7.896.535,900	124.377,416
2008	35.007.921,570	10.099.593,540	631.390,027
2009	36.464.582,690	10.454.551,960	957.974.882

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar dalam Angka

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB Sumatera Barat pada tahun 2006 mencapai sebesar 30,949 milyar dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2008 hingga mencapai 35,007 milyar rupiah , hingga pada akhirnya kembali meningkat pada tahun 2009 mencapai sebesar 36,464 milyar rupiah. Sementara itu, perkembangan nilai investasi swasta pada tahun 2008 mencapai sebesar 631,390 ribu rupiah dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebesar 957,974 ribu rupiah. Sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah Sumatera barat mengalami kenaikan hingga pada tahun 2009 hingga mencapai sebesar 10,454 juta rupiah.

Berdasarkan kondisi dari propinsi Sumatera Barat yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi berfluktuatif yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita penduduknya, dan jumlah investasi swasta yang belum optimal, maka penulis beranggapan perlu meneliti lebih dalam mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul : “ **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.** “

1.2. Perumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terlebih jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif ataupun negatif. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah suatu daerah akan tergantung pada kondisi daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ditemui, yakni sbb :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
2. Bagaimana pengaruh investasi swasta (PMA dan PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sbb :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi swasta (PMA dan PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sbb :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi, khususnya mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

3. Dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pusat dan investasi swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sbb :

1. Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini membahas bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.
2. Bab II : Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi landasan teori pembahasan hasil penelitian sebelumnya, serta mencakup hipotesis dari penelitian ini.
3. Bab III : Metodologi Penelitian
Bab ini berisikan gambaran dari penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, metode pembentukan model, definisi operasional, metode pengolahan dan analisis data, dan metode statistik.
4. Bab IV : Gambaran Umum Penelitian
Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum dari penelitian mulai dari perkembangan PDRB, perkembangan pengeluaran pemerintah, dan perkembangan investasi swasta di propinsi Sumatera Barat.

5. Bab V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian disertai pembahasan dalam skripsi ini.

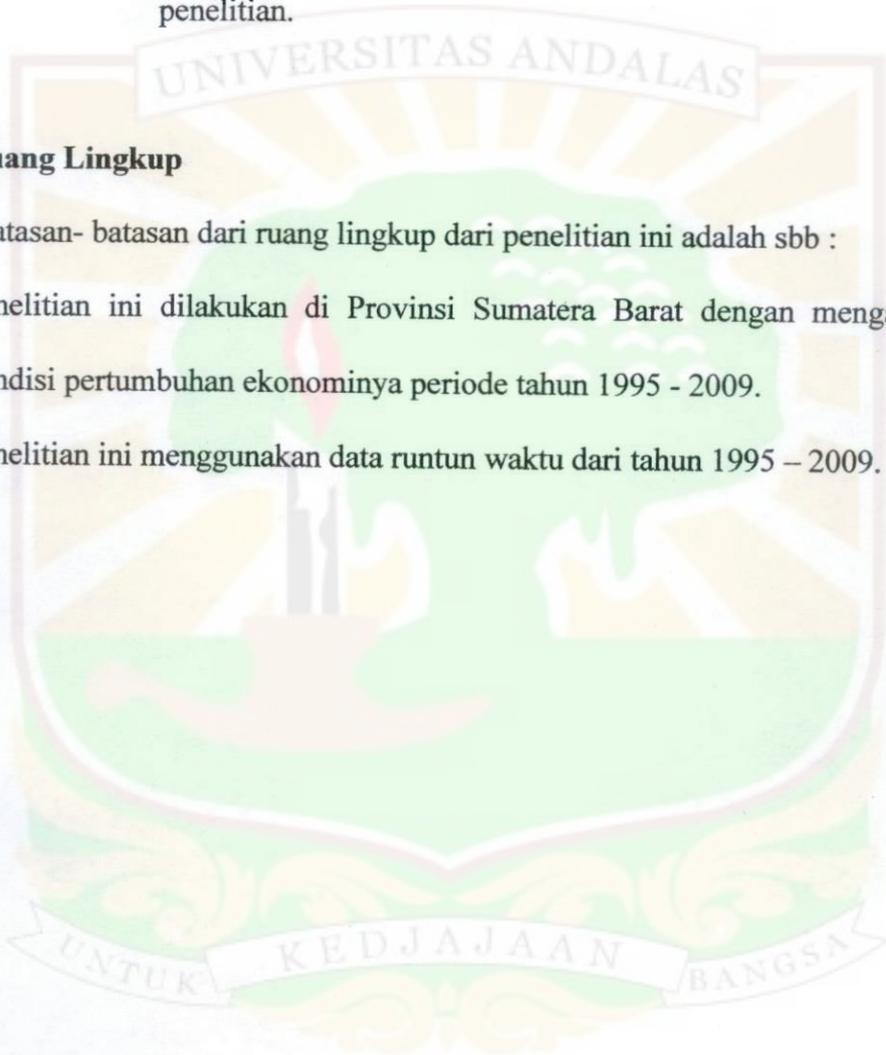
6. Bab VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran - saran dari hasil penelitian.

1.6. Ruang Lingkup

Adapun batasan- batasan dari ruang lingkup dari penelitian ini adalah sbb :

- 1) Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan menganalisis kondisi pertumbuhan ekonominya periode tahun 1995 - 2009.
- 2) Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dari tahun 1995 – 2009.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan aggregate atau pendapatan riil. Peningkatan ini biasanya dihitung selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat adanya peningkatan penggunaan output.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu Negara. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik. Beberapa perkembangan fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur. Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro, 2006) mengemukakan bahwa hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap- tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara lain tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjutan.

Pada tahap awal pembangunan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi cukup besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Namun pada tahap ini, peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap berpengaruh besar pada tahap ini, karena peranan swasta

yang semakin besar banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini juga perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang semakin sulit.

Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap Gross National Product (GNP) semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil (Musgrave, 1989).

Faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni :

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut sebagai investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Misalnya, pembangunan jalan- jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih, dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang semuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan setiap aktivitas ekonomi produktif.
2. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif , sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.
3. Kemajuan teknologi, yang dibedakan atas 3 klasifikasi yaitu :

- Kemajuan teknologi yang bersifat netral
- Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja
- Kemajuan teknologi yang hemat modal.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sbb :

2.1.1. Teori Harrod – Domar

Adapun teori ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

- 1) Perekonomian bersifat tertutup
- 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale)
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi – asumsi tersebut, Harrod – Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila memenuhi syarat – syarat keseimbangan sbb :

$$g = K = n, \text{ dimana : } g = \text{growth (tingkat pertumbuhan output).}$$

K = capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod – Domar dalam Hariani (2008) teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi dalam teori ini disimpulkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

2.1.2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1970) dan Swan (1956). Model ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini dikembangkan oleh Solow yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor- faktor produksi yaitu :

- 1) Pertambahan modal dan tingkat produktifitas modal marginal.
- 2) Pertambahan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja marginal.
- 3) Perkembangan teknologi.

Solow – Swan dalam Hariani (2008) melihat bahwa dalam berbagai hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga peranan pemerintah tidak terlalu dibutuhkan untuk mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yakni akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teori Neo Klasik ini menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar yang sempurna, sehingga perekonomian bisa tumbuh maksimal.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori ini menekankan pada pentingnya peranan pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini para pengusaha merupakan golongan yang terus- menerus melakukan pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Adapun inovasi yang dilakukan meliputi :

- 1) Memperkenalkan barang- barang baru
- 2) Meningkatkan efisiensi dalam memproduksi barang
- 3) Memperluas pasar suatu barang ke pasar- pasar yang baru
- 4) Mengembangkan sumber bahan- bahan mentah
- 5) Mengadakan perubahan- perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu Negara, dimana kenaikan usaha tersebut selanjutnya akan mendorong pengusaha – pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi aggregate akan meningkat.

Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah merasa kebutuhannya sudah terpenuhi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin melambat dan hingga akhirnya tercapai pada tingkat keadaan tidak berkembang (stationery state).



2.1.4. Teori pertumbuhan Rostow

Rostow menggunakan pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi, dimana Rostow membagi pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lima tahap (Prayitno, 1986), yakni :

- 1) Tahap masyarakat tradisional
- 2) Tahap masyarakat untuk tinggal landas
- 3) Tahap lepas landas
- 4) Tahap masa menuju kedewasaan
- 5) Masa pada konsumsi tingkat tinggi.

2.2. Pengeluaran pemerintah

2.2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

2.2.1.1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran ini dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Walter Nicholson, 2001). Secara mikroekonomi, teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor mengenai barang publik (Mangkosuebrot, 1997). Faktor- faktor permintaan akan barang- barang publik dan faktor- faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik dalam menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi

pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut :

- Perubahan permintaan akan barang publik
- Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- Perubahan kualitas barang publik
- Perubahan harga faktor- faktor produksi.

2.2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro, terdiri dari :

1) Rostow dan Musgrave

Dalam teori ini mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio – rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relative besar. Hal ini dikarenakan pada tahap tersebut pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi swasta juga meningkat. Tetapi besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan. Dalam suatu proses pembangunan, Musgrave dan Rostow memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain. Musgrave mengemukakan bahwa rasio investasi total terhadap pendapatan

nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin kecil. Sedangkan Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjutan pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran – pengeluaran untuk layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Teori Musgrave dan Rostow ini merupakan pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak Negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu.

2) Hukum Wagner

Dalam teori ini, Wagner melakukan pengamatan terhadap Negara – Negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 yang menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Hukum Wagner ini dapat dirumuskan sbb :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

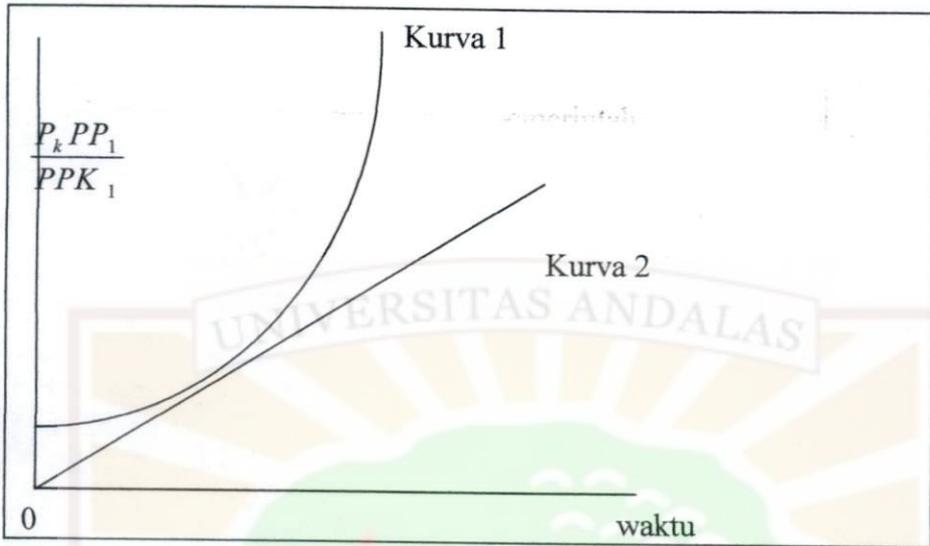
Dimana : $P_k PP$ = pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = pendapatan perkapita yaitu GDP/ jumlah pendapatan

1,2,...,n = jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner dapat ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk yang eksponensial.

Gambar 2.1 :
Pertumbuhan pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber : Mangkoesoebroto, 1993

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yakni tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

3) Peacock dan Wiseman

Mereka mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Dalam teori ini didasarkan pada suatu analisis “dialektika penerimaan – pengeluaran pemerintah “. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, dimana sebagaimana diketahui masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin besar.

Mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Adapun tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk meningkatkan pungutan pajak secara tidak semena – mena. Menurut Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tariff pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat pula.

2.2.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi sehingga menjadi dapat dibedakan atas beberapa kelompok (Suparmoko, 2000) :

- 1) Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Pengeluaran langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
- 3) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
- 4) Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian tersebut, maka pengeluaran Negara dapat dibedakan atas beberapa jenis, yakni :

- 1) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang dan jasa yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa – jasa untuk perusahaan Negara, atau untuk proyek – proyek produktif barang ekspor.
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan – keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (*public health*).
- 3) Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reproduktif, yakni pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang rekreasi, pendirian monument, objek – objek wisata, dan lain sebagainya.
- 4) Pengeluaran yang secara langsung tidak reproduktif dan merupakan pengeluaran yang memboroskan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan / perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang meningkat bagi orang yang menerimanya.
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak – anak yatim piatu. Jika hal ini tidak segera dijalankan, kebutuhan – kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan atas 2 bagian yakni :
pengeluaran aparatur dan pengeluaran publik (Dumairy, 2001).

❖ **Pengeluaran Aparatur**

Yakni pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari – hari, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lainnya. Angsuran belanja apartur memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

❖ **Pengeluaran publik**, yakni pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program – program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Adapun dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Sementara itu, ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran (Boediono, 1999), yakni :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

- c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payments), yaitu pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya (Samuelson dan Nordhaus, 1994).

2.2.3. Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah memiliki peranan dalam kehidupan bernegara, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam kelompok peran (Dumairy, 1996), yaitu :

1. Peranan Alokasi

Peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tetapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara- negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah juga bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.

2. Peranan Distributif

Yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil- hasil ekonomi secara adil dan wajar. Kepemilikan sumber daya, kesempatan ekonomi di setiap Negara acapkali tidak seimbang baik di antara wilayah- wilayah Negara yang bersangkutan maupun di antara sektor- sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil- hasilnya. Kesenjangan

pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak tertentu. Akibatnya daya tawar (bargaining position) antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Di sisi lain, ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif ini dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber- sumber pendapatan lainnya yang untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula, pemerintah bias membelanjakan pengeluarannya.

3. Peran Stabilitatif

Yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta dalam mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang- kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadangkala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah. Dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.

4. Peranan Dinamisatif dinamisator

Yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan- kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan

memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Atas dasar itulah, ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas dilakukan demi pembangunan.

2.3. Konsep dan Teori Investasi Swasta

Istilah lain dari investasi adalah penanaman modal. Selain itu, investasi juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk menambah persediaan kapital (Suparmoko, 2000). Sedangkan menurut Sukirno (2000), investasi merupakan pengeluaran- pengeluaran untuk membeli barang- barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang – barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Kegiatan investasi ini memiliki tiga peranan, yakni : (1) merupakan salah satu pengeluaran aggregate dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan aggregate dan pendapatan nasional ; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja ; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat. Investasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN) dan pihak swasta asing (PMA). PMDN merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta dan badan usaha Negara yang mendapatkan kemudahan dan fasilitas dari pemerintah baik dalam proses perizinan dan kemudahan lainnya yang modalnya berasal dari dalam negeri. Sedangkan PMA adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang

modalnya bersumber dari investor asing dengan mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah (BKPM Sumbar).

Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar. Teori ini mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut lebih menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam perekonomian daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah : (1) perekonomian berada dalam pengerjaan penuh (full employment) dan barang – barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh ; (2) dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan ; (3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, yang berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol) ; (4) kecenderungan untuk menabung, besarnya tetap demikian juga rasio antara modal dan output dan rasio penambahan modal – output.

Investasi swasta pada umumnya didasarkan pada tingkat keuntungan. Adapun data investasi swasta ini diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Besarnya investasi perusahaan dapat dijelaskan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah maka kegiatan investasi akan lebih banyak dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sukirno, 2000). Selanjutnya dikatakan bahwa adanya kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus- menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesempatan kerjanya, meningkatkan pendapatan nasional, dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMDN dan PMA pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Mc Cawley P, 1981). Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal dari swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun PMA, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan investasi swasta telah banyak dilakukan, yakni diantaranya sebagai berikut :

Edi Suandi Hamid (1999), dalam penelitiannya tentang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi di beberapa Negara dengan menggunakan analisa kualitatif yang menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah mutlak. Untuk mendukung peran tersebut, maka perlu tersedianya kelembagaan yang kuat untuk melengkapi dan mengontrol jalannya lembaga pemerintah tersebut. Untuk mendukung perekonomian suatu Negara, BUMN masih diperlukan untuk melengkapi sektor swasta.

Siti Aisyah Tri Rahayu (2000), dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan fungsi dari laju pertumbuhan angkatan kerja, rasio investasi swasta PMA dan PMDN yang disetujui terhadap PDRB, rasio investasi pemerintah daerah terhadap PDRB, rasio pengeluaran/ konsumsi pemerintah (belanja rutin) daerah terhadap PDRB, dan rasio penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah penerimaan non pajak terhadap PDRB. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tanpa memasukkan hasil migas ternyata investasi pemerintah daerah mempunyai efek yang negative, sedangkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dan non pajak memberikan efek positif yang signifikan.

Ida Bagus Raka Surya Atmaja (2001), menganalisis pengaruh investasi swasta, pengaruh investasi sektor publik yang meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak / non pajak serta pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota di Bali. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan yang sangat dominan di Propinsi Bali terlihat dari signifikansinya melebihi investasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu perekonomian diharapkan peranan pemerintah semakin berkurang hanya sebagai fasilitator dan peranan masyarakat swasta semakin meningkat.

Sofwin Hardiati (2002), tentang penelitiannya di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data runtut waktu selama tahun 1980 – 2001 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) merupakan fungsi dari investasi swasta baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), pengeluaran pembangunan pemerintah, jumlah tenaga kerja dan sarana angkutan umum. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa investasi swasta baik PMDN maupun PMA, pengeluaran pembangunan pemerintah, jumlah angkatan kerja, sarana angkutan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Adi Raharjo (2006), yang menganalisis tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang periode tahun 1982 – 2003 dengan menggunakan metode regresi berganda. Adapun hasil dari penelitiannya tersebut dikemukakan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.

2.5. Hipotesa Penelitian

Adapun hipotesa dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
- 2) Pengeluaran investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan mempunyai data yang bersifat berkala (time series). Data yang dipakai adalah data pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian dan perdagangan serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat periode tahun 1995 - 2009. Data- data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) yang berupa PDRB Sumatera Barat.

3.2. Metode Pembentukan Model

Untuk mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah pusat dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (dependent variabel) dan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta sebagai variabel bebasnya (independent variabel).

Secara matematis, model dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Gujarati, 1999) :

$$Y = a_0 + b_1G + b_2Is + U \dots\dots\dots(3.1)$$

- Dimana : Y = pertumbuhan ekonomi
 G = pengeluaran pemerintah
 Is = investasi swasta
 a₀ = konstanta
 b₁, b₂ = koefisien regresi setiap variabel
 U = error term

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen maka persamaan di atas ditransformasikan menjadi persamaan regresi linier berganda dengan mengubahnya ke dalam bentuk logaritma yaitu :

$$\text{Log } Y = a_0 + b_1\text{Log } G + b_2\text{Log } IS + U \dots\dots\dots(3.2)$$

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Pertumbuhan ekonomi

merupakan variabel yang digambarkan dengan nilai konstan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tahun dasar 2000. Variabel ini menggunakan satuan milyar rupiah.

2. Pengeluaran pemerintah

merupakan besarnya realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah didekati dengan jumlah pengeluaran pembangunan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 1995 – 2009 yang dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.

3. Investasi swasta (PMDN dan PMA)

PMDN merupakan investasi dalam negeri yang dilakukan oleh pihak swasta atau di luar sektor pemerintah. Sedangkan PMA merupakan investasi asing yang dilakukan oleh pihak swasta atau di luar sektor pemerintah. Data yang digunakan realisasi PMDN dan PMA di propinsi Sumatera Barat periode 1995 – 2009.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda. Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka alat analisis yang dipakai dalam pengolahan data tersebut adalah program SPSS 16.00.

3.5. Pengujian Model Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik model regresi (Nugroho, 2005). Jika terjadi pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka akan mengurangi keadaan penaksiran parameter. Beberapa asumsi yang digunakan dalam model regresi ini adalah :

3.5.1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik harus memiliki distribusi normal ataupun mendekati normal. Untuk mengetahui bentuk distribusi data bisa menggunakan grafik

distribusi dan analisis statistik. Penggunaan grafik distribusi ini merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan. Hal untuk dikarenakan bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal di sepanjang garis diagonal.

3.5.2. Uji Multikolinearitas

Merupakan ada tidaknya suatu hubungan linier yang sempurna atau yang mendekati sempurna antara beberapa atau semua variable bebas. Adapun cara untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model adalah sbb :

- Jika nilai DW lebih besar dari dua, maka diartikan terjadi gejala multikolinearitas negative.
- Jika DW antara minus dua (-2) sampai dua (+2), maka diartikan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3.5.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antara variabel gangguan (error) dalam suatu regresi. Autokorelasi ini bisa muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Apabila suatu model regresi mengandung autokorelasi maka akan memberikan konsekuensi model regresi tersebut tidak mempunyai varian yang minimum. Varian yang tidak minimum akan mengakibatkan

kita tidak bisa mengevaluasi hasil regresi baik melalui uji t maupun uji F (skripsi Dini Devita Sari, 2010).

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (d_L dan d_u). Adapun aturan pengujiannya yakni sbb :

- $d < d_L$: terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan
- $d_L < d < d_u$: ada masalah korelasi positif tetapi lemah.
- $d_u < d < 4-d_u$: tidak ada masalah autokorelasi
- $4-d_u < d < 4-d_L$: masalah autokorelasi lemah
- $4-d_L < d$: masalah autokorelasi serius

3.5.4. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti situasi dimana dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu penelitian ke penelitian lain. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

3.6. Metode Pengujian Statistik

Pengujian hipotesis disebut juga dengan pengujian signifikansi yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap- tahap sbb :

3.6.1. Pengujian Koefisien Regresi secara serentak (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependent/ terikat.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$, artinya apakah semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_k \neq 0$

Hipotesis 1

$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$, semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Hipotesis 2

$H_a : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2. Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara individual. Digunakan uji t dengan tingkat kepercayaan 5 % dengan hipotesis :

Hipotesis 1 :

$H_0 : \alpha_1 \leq 0$ Pengeluaran pemerintah pusat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

$H_a : \alpha_1 > 0$ Pengeluaran pemerintah pusat berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

Hipotesis 2 :

$H_0 : \alpha_2 \leq 0$ Investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

$H_a : \alpha_2 > 0$ Investasi swasta berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

Dengan ketentuan H_0 ditolak bila probabilitas lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 5% dan H_0 diterima bila probabilitas lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 5%.

3.6.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependent dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independent, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1 ($0 < R^2 < 1$) (Gujarati, 1999). Nilai R^2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sbb (Sofyardi, 2005) :

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2} \dots\dots\dots(3.14)$$

Apabila $R^2 = 1$, maka persentase variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X_1, X_2 adalah 100 %. Jika $R^2 = 0$, maka variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah 0 % (tidak ada).

Kelemahan yang paling mendasar dalam menggunakan koefisien ini adalah bias terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 1 variabel independent, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Oleh karena itu, banyak penelitian yang menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Luas dan Kondisi Geografis

Propinsi Sumatera Barat terletak di antara $0^{\circ} 54'$ lintang utara dan $3^{\circ} 30'$ lintang selatan serta $98^{\circ} 36'$ dan $101^{\circ} 53'$ bujur timur. Wilayah Sumatera barat ini terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Propinsi Riau, Propinsi Jambi, dan Propinsi Sumatera Utara. Adapun luas wilayah Propinsi Sumatera Barat ini yakni sekitar 42,2 ribu km^2 . Garis pantai terdapat di sisi barat, yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat terdapat di wilayah pantai ini. Kepulauan Mentawai yang terdapat cukup jauh di lepas pantai berjajar searah dengan garis pantai daratan utama dan menjadi penghalang terpaan ombak besar dari Samudra Hindia. Ini menyebabkan perairan laut antara Kepulauan Mentawai dan daratan utama provinsi Sumatera Barat merupakan perairan laut yang cukup tenang. Kondisi ini mendukung perkembangan sektor pariwisata dan perikanan di wilayah ini. Perairan tenang dapat dilayari dengan aman serta banyak kehidupan laut menjadikan perairan di wilayah ini sebagai habitat utama.

Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 kota. Adapun daerah yang memiliki wilayah terluas di Sumatera Barat yaitu Kepulauan mentawai dengan

luas 6,01 ribu km² dan daerah yang memiliki luas wilayah yang terkecil yaitu Kota Padang panjang yakni dengan luas 23,0 ribu km².

Bentang darat Sumatera Barat didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Wilayah dataran tinggi dan pegunungan, termasuk kawasan Bukit Barisan merupakan daerah terluas di Sumatera Barat. Sekitar 70 persen bentang darat Provinsi Sumatera Barat merupakan lahan yang tidak datar, Wilayah Sumatera Barat merupakan perbukitan dan pegunungan yang memiliki lereng-lereng yang terjal, terutama lereng-lereng perbukitan dan pegunungan di sebelah barat yang menghadap ke Samudra Hindia. Rangkaian pegunungan mendominasi wilayah provinsi Sumatera Barat ini ditempati oleh banyak puncak gunung, di antaranya Gunung Gedang, Maitang, Marapi, Pantai Cermin, Pasaman, Tandiket, Tangga, serta Kerinci (3.800 m) yang terletak di daerah perbatasan dengan Jambi dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Sedikit lahan yang agak rata terdapat di sebelah timur dan sedikit dataran rendah terdapat di sudut tenggara serta kawasan pesisir pantai yang sempit. Di wilayah pegunungan di bagian tengah Sumatera Barat terdapat beberapa perairan pedalaman yang menjadi sumber air penting bagi provinsi ini. Dengan luas 13.011 km², Danau Singkarak yang melintasi wilayah Kabupaten Solok dan Tanah Datar merupakan danau terbesar di Sumatera Barat. Danau Maninjau yang memiliki luas 9.950 km² terdapat di Kabupaten Agam. Tiga danau lainnya, yaitu Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) juga terdapat di Kabupaten Solok.

Sumatera Barat juga memiliki potensi ekonomi yang cukup banyak. Perairan pantai barat serta kawasan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Daerah pesisir pantai, terutama kawasan Kepulauan Mentawai menghasilkan banyak kelapa. Di daerah perbukitan dan pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkeh, dan lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan juga menghasilkan kayu. Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan atau pegunungan yang curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di provinsi Sumatera Barat.

4.1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk Sumatera Barat yakni orang – orang yang berada di daerah Sumatera Barat dalam suatu jangka waktu tertentu misalnya dalam satu tahun. Dalam pembangunan ekonomi, jumlah penduduk merupakan faktor terpenting, dimana penduduk merupakan tenaga potensial untuk melaksanakan pembangunan. Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh faktor ilmiah seperti kelahiran (fertilitas), dan kematian (mortalitas). Perubahan penduduk dipengaruhi oleh migrasi penduduk dan juga dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian.

Adanya migrasi yang dilakukan dari suatu daerah ke daerah lain pada umumnya terjadi karena keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus dan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar tercapai kehidupan yang lebih baik lagi. Akan tetapi dengan adanya migrasi ini tentu akan membuat jumlah penduduk semakin bertambah di daerah tersebut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Barat
Tahun 1995 – 2009

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
1995	4.328.200	-
1996	4.390.000	1,43
1997	4.451.300	1,40
1998	4.473.250	0,49
1999	4.541.970	1,54
2000	4.220.320	-7,08
2001	4.234.510	0,34
2002	4.375.078	3,32
2003	4.456.816	1,87
2004	4.528.242	1,60
2005	4.603.957	1,67
2006	4.632.152	0,61
2007	4.697.800	1,42
2008	4.763.100	1,39
2009	4.827.973	1,36

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar dalam Angka

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk propinsi Sumatera Barat selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya proses kelahiran dan kematian yang semakin bertambah dan migrasi dari daerah lain yang mengharapkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat hingga pada tahun 2009 mencapai sebanyak 4.827.973 jiwa yang terdiri dari 2.367.599 jiwa laki – laki dan 2.460.347 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Sumatera Barat selama periode lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya, yakni dari tahun 2005 sebanyak 4.603.957 jiwa dan kemudian meningkat pada tahun

2009 menjadi sebanyak 4.827.973 jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2009 sebanyak 4.827.973 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 3,32 %. Pada tahun 2000 terjadi penurunan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhannya hanya sebesar -7,08 persen. Hal ini disebabkan oleh tingkat migrasi keluar daerah Sumatera Barat yang semakin tinggi.

Apabila dibandingkan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan penduduk, maka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduknya. Hal ini menandakan masyarakat propinsi Sumatera Barat bisa dikatakan sejahtera. Meskipun pada tahun 1998, laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk dimana tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi pada tahun berikutnya laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang positif, sehingga laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kembali kesejahteraan hidup masyarakat.

4.2. Deskripsi Variabel

4.2.1. Perkembangan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Dengan kata lain PDRB merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi secara regional yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat dicerminkan oleh PDRB sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor yang ikut memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing – masing sektor. PDRB baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dapat mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Perkembangan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari dua sisi pendekatan, yakni dari sisi sektoral dan sisi penggunaan. Perkembangan dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah yang mampu diciptakan oleh sektor – sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan yakni menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Perkembangan data PDRB propinsi Sumatera Barat tiap tahunnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2 :
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Sumatera Barat Tahun 1995 – 2010

No	Tahun	PDRB (000 rupiah)	Pertumbuhan per tahun (%)
1	1995	21.571.699,420	-
2	1996	22.189.603,460	7,87
3	1997	23.323.502,710	5,11
4	1998	21.753839,980	- 6,73
5	1999	22.043.156,830	1,33
6	2000	22.889.614,050	3,84
7	2001	23.727.373,930	3,66
8	2002	24.840.187,760	4,69
9	2003	26.146.781,630	5,26
10	2004	27.578.136,560	5,47
11	2005	29.159.480,570	5,73
12	2006	30.949.945,100	6,14
13	2007	32.912.968,590	6,34
14	2008	35.007.921,570	6,37
15	2009	36.464.582,690	4,16
Rata – rata pertumbuhan per tahun			3,94

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar Dalam Angka

Perekonomian Sumatera Barat dari tahun 1995 – 2009 secara umum telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 1995 – 2009 Sumatera Barat telah mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata – rata 3,94 %. Dalam periode ini laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi sebagai bukti bahwa perekonomian Sumatera Barat mengalami krisis yang melanda perekonomian nasional. Pada tahun 1995, Sumatera Barat masih mencapai laju pertumbuhan yang positif mendekati angka 8,93 %. Sejak itu laju pertumbuhan terus mengalami penurunan hingga terjadi resesi ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi negatif sekitar -6,73 % pada tahun 1998. Perekonomian Sumatera Barat baru mengalami pemulihan pada tahun 2000 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 1,33 % pada tahun 1999 menjadi 3,84 % pada tahun 2000 dan 5,47 % pada tahun 2004. Laju pertumbuhan ekonomi ini terus mengalami kenaikan pada periode 1999 – 2004, namun belum mampu kembali mencapai rata – rata laju pertumbuhan sebelum tahun 1998.

Kemudian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sejak tahun 2005 sudah mengalami pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor ekonomi. Konsumsi rumah tangga dalam hal ini masih merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi dengan mencapai 5,73 % dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2004. Jika diperhatikan, pergerakan ekonomi Sumatera Barat sejak tahun 1999 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Namun demikian, masih diperlukan suatu stimulus dan kebijakan yang tepat guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini terutama melalui

kegiatan investasi. Melonjaknya kredit investasi pada tahun 2007 memberikan harapan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Sumbar yang belum sustainable (berkelanjutan). Bencana alam dan isu tsunami pada tahun 2007 ternyata juga tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar). PDRB Sumbar justru mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun 2006 dengan konsumsi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumbar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 telah meningkat 6,34 % dari tahun 2006 yang hanya mencapai 6,14 %. Perekonomian Sumatera Barat masih tetap tumbuh ekspansif meskipun tekanan inflasi meningkat. Pada tahun 2008 perekonomian Sumbar mencapai 6,37 %. Meningkatnya harga komoditas dunia selama pada tahun 2008 ini membawa pengaruh positif dan negatif bagi perekonomian Sumbar. Di satu sisi kenaikan harga komoditas mendorong kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor, dan investasi. Namun di sisi lain, tekanan inflasi pun mulai meningkat baik dari IHK (Indeks Harga Konsumen) maupun inflasi inti.

Namun pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Sumbar justru mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4,16 %. Hal ini tidak lepas disebabkan karena pengaruh gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 di Padang. Hingga pada tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kembali meningkat dari tahun sebelumnya yakni mencapai 5,93 % hampir pada semua sektor ekonomi.

4.2.2. Perkembangan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Pusat

Penjelasan mengenai perkembangan alokasi pengeluaran pemerintah dengan menggunakan dua pendekatan yakni pertumbuhan serta proporsi yang dapat memberikan suatu petunjuk secara umum perihal bagaimana kebijakan pengeluaran pemerintah yang telah dijalankan selama kurun waktu penelitian.

Berikut adalah tabel pengeluaran pemerintahan Sumatera Barat tahun 1995 – 2009 :

Tabel 4.3 :
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Tahun 1995 – 2009 (000 rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
1995	333.131.990
1996	369.969.250
1997	491.915.980
1998	509.711.920
1999	790.340.530
2000	832.500.300
2001	1.838.847.930
2002	2.625.628.430
2003	3.535.542.980
2004	3.641.715.050
2005	2.051.742.800
2006	6.782.311,880
2007	7.896.535.900
2008	10.099.593.540
2009	10.454.551.960

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tabel di atas menunjukkan data besarnya pengeluaran pemerintah di Propinsi Sumatera Barat periode tahun 1995 – 2009. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Sumatera Barat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan

untuk pembangunan di propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1995, jumlah anggaran pengeluaran pembangunan pemerintah adalah sebesar Rp 33,313 milyar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 1996 menjadi sebesar Rp 36,996 milyar rupiah. Setelah itu, jumlah anggaran pengeluaran pembangunan pemerintah Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan pada tahun 1998 hingga sebesar Rp 50,971 milyar rupiah. Pada tahun 2002, jumlah anggaran tersebut pun kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai sebesar Rp 262,562 milyar rupiah. Hal ini menyebabkan proses pembangunan sarana dan prasarana di Sumatera Barat juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, jumlah anggaran pengeluaran pembangunan dana pusat mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 353,355 milyar rupiah. Dan pada tahun 2007 jumlah anggaran pengeluaran pembangunan yang disediakan pemerintah pusat untuk daerah Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam yakni hingga mencapai sebesar Rp 7,896 triliun rupiah. Hingga pada akhirnya pada tahun 2009, jumlah pengalokasian dana pengeluaran pemerintah tersebut sudah mencapai sebesar Rp 10,454 triliun rupiah. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah khususnya di bidang pembangunan di propinsi Sumatera Barat, maka kesejahteraan masyarakatnya pun semakin meningkat.

4.2.3. Perkembangan Investasi Swasta di Sumatera Barat

Investasi swasta adalah investasi secara murni yang meliputi pembelian, penambahan, dan pembentukan barang modal dan perubahan stok oleh pihak swasta. Investasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN) dan

pihak swasta asing (PMA). Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan investasi swasta di Sumatera Barat adalah dengan melihat investasi PMDN dan investasi PMA. Investasi PMDN merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan badan usaha Negara yang mendapatkan kemudahan dan fasilitas dan fasilitas dari pemerintah baik dalam proses perizinan dan kemudahan lainnya yang modalnya berasal dari dalam negeri. Sedangkan investasi PMA adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang modalnya bersumber dari investor asing dengan mendapat kemudahan dan fasilitas dari pemerintah (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Dalam perencanaan pembangunan, target pertumbuhan ekonomi telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut sangat diperlukan investasi yang membutuhkan ketersediaan dana pembangunan. Untuk itu, seberapa jauh dana yang tersedia dipakai secara efisien dan seberapa besar dana yang dibutuhkan agar tercapainya target tersebut perlu direncanakan lebih cermat lagi.

Berikut ini adalah tabel data investasi swasta Sumatera Barat baik yang bersumber dari PMA maupun PMDN :

Tabel 4.4 :
Perkembangan Realisasi Investasi Swasta PMDN dan PMA
Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995 – 2008 (000 Rupiah)

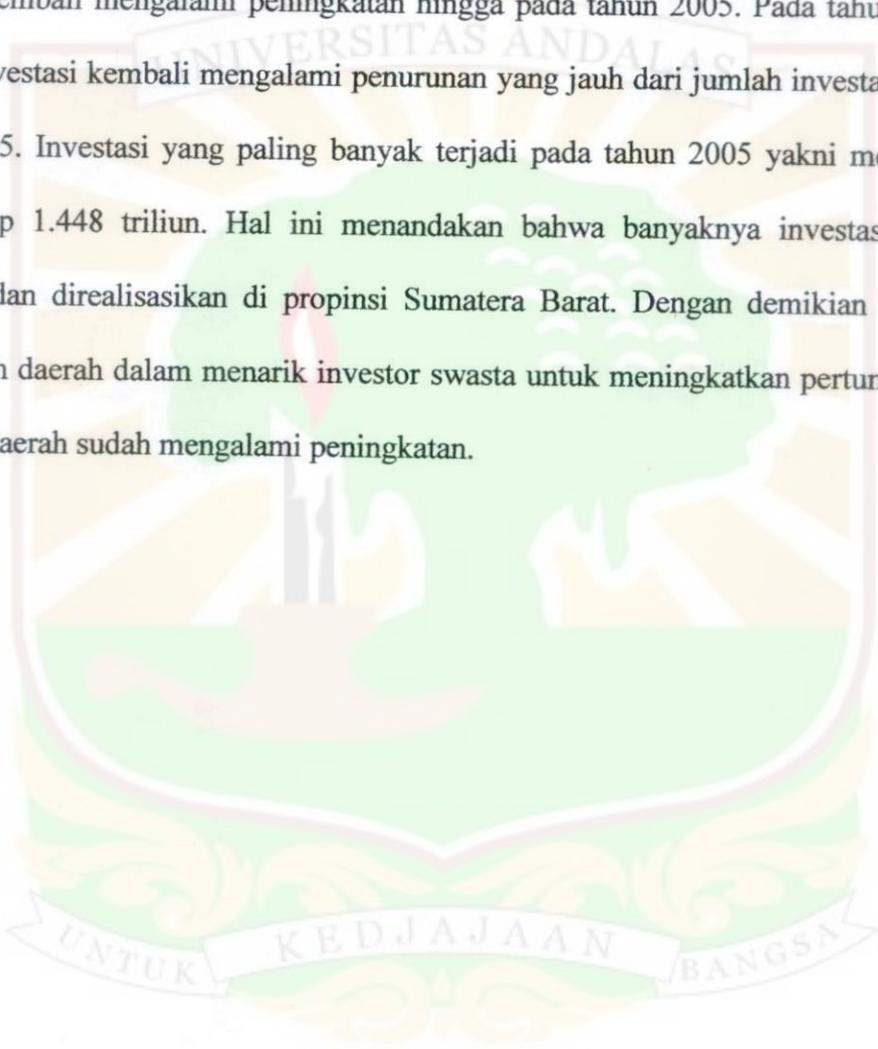
Tahun	Investasi swasta PMDN	Investasi Swasta PMA	Total Investasi (PMDN + PMA)
1995	256.046.800	93.457.844	349.504.644
1996	204.090.910	73.034.148	277.125.058
1997	421.169.810	129.750.480	550.920.290
1998	685.383.230	339.337.125	1.024.720.355
1999	348.030.020	576.193.400	924.223.420
2000	187.773.150	588.413.375	776.186.525
2001	183.978.140	1.118.936.000	1.302.914.140
2002	348.234.000	1.059.845.940	1.408.079.940
2003	204.464.890	248.354.635	452.819.525
2004	631.733.330	274.352.280	659.168.558
2005	607.061.370	841.133.440	1.448.194.810
2006	234.857.820	788.555.460	313.713.360
2007	58.511.000	65.866.416	124.377.416
2008	608.918.000	224.720.270	631.390.027
2009	761.618.000	196.356.882	957.974.882

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka dan Laporan BKPM, data diolah

Dari tabel di atas terlihat perkembangan investasi swasta Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 1995 jumlah investasi swasta sebesar Rp 349 triliun dan jumlah ini terus meningkat sampai tahun 2009 menjadi Rp 957,9 triliun. Investasi swasta PMDN dan investasi swasta PMA yang terendah terjadi pada tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikitnya proyek investasi swasta PMDN dan PMA yang disetujui oleh pemerintah Sumatera Barat. Sedangkan investasi swasta PMDN yang paling banyak terjadi pada tahun 2009 dan investasi swasta PMA yang paling tinggi terjadi pada tahun 2001. Hal ini

menandakan bahwa investasi swasta PMDN dan PMA pada saat itu banyak yang disetujui dan direalisasikan oleh pemerintah Sumatera Barat.

Apabila dilihat secara keseluruhan, investasi swasta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi pada tahun 2003 jauh mengalami penurunan dibandingkan jumlah investasi pada tahun 2002. Akan tetapi pada tahun berikutnya tingkat investasi tersebut kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2005. Pada tahun 2006 jumlah investasi kembali mengalami penurunan yang jauh dari jumlah investasi pada tahun 2005. Investasi yang paling banyak terjadi pada tahun 2005 yakni mencapai sebesar Rp 1.448 triliun. Hal ini menandakan bahwa banyaknya investasi yang disetujui dan direalisasikan di propinsi Sumatera Barat. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah dalam menarik investor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sudah mengalami peningkatan.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Barat tahun 1995 – 2009. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta (PMDN dan PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi variabel dependennya yakni pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 2000, dan yang menjadi variabel independennya yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi swasta (PMDN dan PMA).

Tabel 5.1 :
Data Penelitian

Tahun	PE	GE	Is
1995	21.571.699,420	333.131.990	349.504.644
1996	22.189.603,460	369.969.250	277.125.058
1997	23.323.502,710	491.915.980	550.920.290
1998	21.753839,980	509.711.920	1.024.720.355
1999	22.043.156,830	790.340.530	924.223.420
2000	22.889.614,050	832.500.300	776.186.525
2001	23.727.373,930	1.838.847.930	1.302.914.140
2002	24.840.187,760	2.625.628.430	1.408.079.940
2003	26.146.781,630	3.535.542.980	452.819.525
2004	27.578.136,560	3.641.715.050	659.168.558
2005	29.159.480,570	2.051.742.800	1.448.194.810
2006	30.949.945,100	6.782.311,880	313.713.360
2007	32.912.968,590	7.896.535.900	124.377.416
2008	35.007.921,570	10.099.593.540	631.390.027
2009	36.464.582,690	10.454.551.960	957.974.882

Sumber : data diolah

5.2. Analisis Hasil Regresi

5.2.1. Uji Asumsi Klasik

5.2.1.1. Uji Normalitas

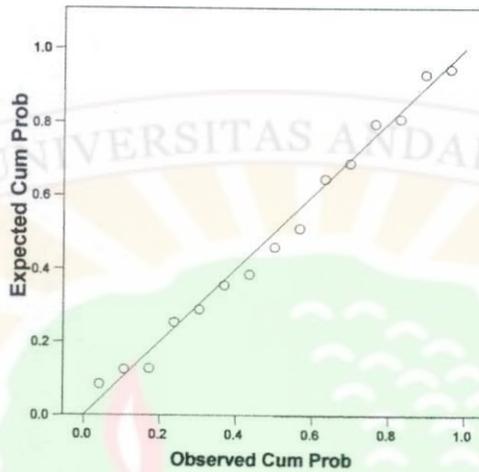
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal uji normalitas yang dapat dilakukan dengan melihat grafik.

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan terhadap penelitian ini maka diperoleh hasil data seperti yang terlihat pada grafik berikut :

Gambar 5.1 :

**Normal P-P Plot of Regression
Standardized Residual**

Dependent Variable: PDRB



Sumber : Data diolah

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa titik – titik distribusi berada di sekitar garis lurus diagonal, sehingga dapat disimpulkan distribusi frekuensi PDRB sesuai dengan distribusi uji. Dengan kata lain, kesimpulan yang diperoleh adalah penyebaran PDRB mengikuti distribusi normal.

5.2.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat ada tidaknya suatu hubungan linier yang sempurna atau yang mendekati sempurna antara beberapa atau semua variable bebas. Besarnya pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain dapat

dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Adapun metode dari suatu model regresi yang dikatakan bebas masalah multikolinearitas yakni :

- a. Memiliki nilai VIF di bawah angka 10 dan nilai tolerance di atas 0,10
- b. Koefisien korelasi antara variabel independen harus lemah (di bawah 0,5).

Jika korelasi kuat maka itu berarti terjadi masalah multikolinearitas.

Adapun hasil uji multikolinearitas antara variabel independen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.2

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pengeluaran pemerintah	0,994	1.006	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Investasi swasta	0,994	1,006	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : data diolah

Dari hasil uji di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tolerance untuk pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berada di atas angka 0,10 dan nilai VIF berada di bawah angka 10. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi korelasi ataupun multikolinearitas antar variabel independent.

5.2.1.3 Uji Autokorelasi

Adapun tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak. Untuk menguji ada atau tidaknya

autokorelasi dalam model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson.

Berikut adalah hasil uji autokorelasi yang diperoleh :

Tabel 5.3
Uji Autokorelasi

Variabel Independen	Durbin - Watson
PDRB	1,652

Sumber : Data diolah

Dari hasil penelitian di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,652 dimana nilai tersebut terletak di antara 1,65 dan 2,35, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi dan model ini layak digunakan.

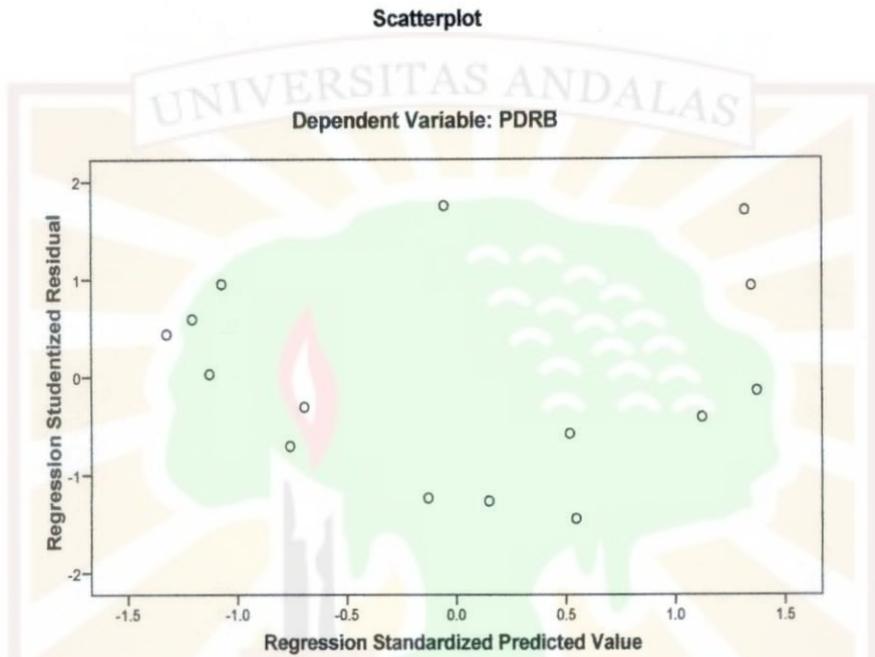
5.2.1.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Untuk melihat hasil uji ini, dapat digunakan dengan metode grafik Scatterplot yakni dengan melihat pola scatterplot yang menunjukkan kelayakan model regresi yang digunakan. Apabila terdapat gejala heterokedastisitas, maka titik – titik pada grafik akan membentuk suatu bentuk yang sistematis. Sebaliknya, jika tidak terdapat gejala heterokedastisitas, maka titik – titik pada grafik tidak akan membentuk suatu bentuk yang sistematis atau acak.

Berdasarkan model estimasi data yang dilakukan maka diperoleh hasil uji seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.2



Sumber : data diolah

Dari hasil grafik di atas dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada titik – titik grafik yang menyebar di atas tidak membentuk suatu pola yang sistematis atau acak.

5.2.2. Pengujian Hipotesis

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.

Apakah masing – masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independent apabila variabel independent mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 5.4 : Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.358	.291		32.125	.000
Log GE	.137	.016	.921	8.772	.000
Log Is	-.023	.027	-.089	-.849	.413

a. Dependent Variable : Log PDRB

Berdasarkan table di atas maka diperoleh persamaan regresi berikut ini :

$$Y = a + b_1 \text{Log GE} + b_2 \text{Log Is}$$

$$Y = 9,358 + 0,137 \text{Log GE} - 0,023 \text{Log Is}$$

$$\text{T-test} \quad (8,772) \quad (-0,849)$$

$$\text{Sig} \quad (0,000) \quad (0,413)$$

$$R^2 = 0,869$$

$$\text{F-hitung} = 39,686$$

Dimana : Y = pertumbuhan ekonomi

a = konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi

GE = pengeluaran pemerintah

Is = investasi swasta

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan nilai konstanta sebesar 9,358 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah dan investasi swasta bernilai tetap, maka tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 9,358. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari masing – masing variabel independent terhadap variabel dependennya, maka digunakan uji-t. Dari data diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk pengeluaran pemerintah adalah sebesar 8,772 dimana t_{tabel} nya adalah sebesar 1,782. Sementara itu investasi swasta dengan nilai t_{hitung} sebesar - 0,849 dengan signifikansi 0,413.

Koefisien regresi untuk pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,137. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga akan mengalami peningkatan sebesar 13,7 %. Sedangkan koefisien regresi untuk investasi swasta adalah sebesar -0,023. Artinya jika investasi swasta mengalami kenaikan 1 % maka tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 2,3 %. Hal ini mungkin dikarenakan oleh perhitungan investasi swasta dikonfersikan ke dalam rupiah, dimana nilai tukar rupiah selalu berfluktuasi dan krisis ekonomi yang terjadi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

5.2.2.1. Uji F

Adapun tujuan dari uji F ini adalah untuk mengkaji signifikan pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Tabel 5.5 :

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.076	2	.038	39.686	.000(a)
	Residual	.011	12	.001		
	Total	.087	14			

a Predictors: (Constant), Investasiswasta, Pengeluaranpemerintah

b Dependent Variable: PDRB

Langkah – langkah uji F :

1) Merumuskan hipotesa

H_0 : tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

H_a : ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

2) Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$.

3) Menentukan F hitung

Nilai F_{hitung} yang diperoleh pada hasil penelitian adalah 39,686.

4) Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 %, $\alpha = 5 \%$, nilai $df_1 = 2 (n - 1)$, dan $df_2 = 12 (n - k - 1)$, dimana n adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen. Dengan demikian diperoleh hasil untuk F_{tabel} sebesar 3,49.

5) Kriteria Pengujian

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$.

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Dari kriteria tersebut, terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 39,686, sedangkan $F_{tabelnya}$ sebesar 3,49. Ini berarti bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($39,686 > 3,49$) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

5.2.2.2. Uji t

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

1) Pengujian koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah (GE)

a. Menentukan hipotesis

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

H_a : secara parsial ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

b. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan dengan menggunakan $\alpha = 5 \%$.

c. Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan 5.4 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,772.

d. Menentukan t_{tabel}

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 %, $\alpha = 5 \%$, diketahui $df1 = 2$, dan $df2 = 12 (n - k - 1)$, sehingga diperoleh hasil t_{tabel} sebesar 1,782.

e. Kriteria pengujian

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Pada hasil pengujian regresi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,782 dan nilai t_{hitung} sebesar 8,772. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,772 > 1,782$), sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak yang artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

2) Pengujian koefisien regresi variabel investasi swasta

a. Menentukan hipotesis

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh antara investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

H_a : secara parsial ada pengaruh antara investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

b. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan dengan menggunakan $\alpha = 5 \%$.

- c. Menentukan t hitung

Berdasarkan 5.4 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,849$

- d. Menentukan t_{tabel}

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 %, $\alpha = 5$ %, diketahui $df1 = 2$, dan $df2 = 12 (n - k - 1)$, sehingga diperoleh hasil t_{tabel} sebesar $1,782$.

- e. Kriteria pengujian

H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Pada hasil pengujian regresi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar $1,782$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,849$. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel} (-0,849 < 1,782)$, sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima yang artinya variabel investasi swasta tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

5.2.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependent dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independent. Berdasarkan hasil regresi yang telah diperoleh diketahui nilai R^2 sebesar $0,869$. Ini berarti $86,9$ % tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dapat dijelaskan oleh tingkat pengeluaran pemerintah pusat untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sisanya $13,1$ % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Korelasi (R) yang terjadi antara tingkat pengeluaran pemerintah pusat untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,932 atau 93,2 %. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara tingkat pengeluaran pemerintah dan investasi asing (PMDN dan PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

5.3. Analisis Ekonomi

Dalam bagian ini membahas berupa hasil temuan penelitian tentang pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode 1995 – 2009.

5.3.1. Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil uji statistik variabel pengeluaran pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Ini berarti sesuai dengan hipotesa awal yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Dengan meningkatnya tingkat pengeluaran pemerintah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat juga dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

5.3.2. Investasi Swasta

Berdasarkan hasil uji statistik variabel investasi swasta secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal ini berarti tidak sesuai dengan hipotesa awal yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Tri Rahayu (2000) mengenai “pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, dimana dalam penelitiannya itu disebutkan bahwa investasi swasta dan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Adanya pelaksanaan otonomi daerah ternyata telah memperburuk iklim investasi di Sumatera Barat bahkan di daerah – daerah lain. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Hal ini kemudian diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan baik resmi maupun liar.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan investasi swasta tersebut diperlukan adanya koordinasi peraturan perundang – undangan dari pemerintahan sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan tersebut. Pihak pemerintah juga perlu kembali menyederhanakan prosedur investasi, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya semakin besar. Dengan begitu, proses kegiatan investasi di Sumatera Barat bisa semakin lancar dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

- 1) Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 1995 – 2009 terus mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 1998 yang disebabkan karena krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar -6,73 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dapat dilihat dari jumlah PDRB pada tahun 1999 yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2009.
- 2) Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yakni pengeluaran pemerintah ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 8,772 dengan nilai signifikan 0,000 pada tingkat kepercayaan 95 %.
- 3) Berdasarkan hasil regresi dari penelitian ini, juga terlihat bahwa variabel investasi swasta ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,089 < 1,782$). Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta di

propinsi Sumatera Barat belum sukses dijalankan dan dipergunakan secara maksimal.

6.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

- 1) Oleh karena pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka diharapkan pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah anggaran pengeluarannya dengan prinsip akuntabilitas dan efektif.
- 2) Untuk meningkatkan investasi swasta, sebaiknya pemerintah membuat keadaan yang dapat meningkatkan dan mendorong investasi melalui kebijakan – kebijakan yang mempermudah masuknya investasi di propinsi Sumatera Barat. Kebijakan ini dapat dilakukan misalnya melalui program perizinan investasi satu atap dan menghapuskan sistem pungutan liar agar industri dapat kompetitif, serta memberikan insentif yang memungkinkan untuk menarik investasi.
- 3) Nilai R^2 adalah sebesar 0,869 %, yang artinya 86,9 % variasi variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Sedangkan sisanya 13,1 % dijelaskan oleh variabel lain. Untuk itu diharapkan bagi penelitian berikutnya agar mengembangkan variabel –

variabel lain yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Ida Bagus Raka Surya. 2001. *Peranan Investasi Swasta, Investasi Sektor publik dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan GDP di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No.2
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Daerah*, Edisi 1995 – 2010. Padang
- , Sumatera Barat. Edisi 1995 - 2010. *Sumatera Barat dalam Angka*. Padang
- BI, *Statistik Keuangan Indonesia*, Berbagai Edisi 1995 – 2010. Padang
- BKPM Propinsi Sumatera Barat, *Perkembangan Nilai Investasi PMDN dan PMA Propinsi Sumatera Barat*, Berbagai Edisi 1993 – 2008. Padang
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Dornbusch, Rudiger ; Stanley Fischer. 1997. *Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Media Global Edukasi.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Hamid, Edy Suandi. 1999. *Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XLXV No. 8
- Hariani. 2008. *Jurnal : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 1977 – 2005*.
<http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-harianierm-8690>.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mangkosoebroto, Guritno. 1993. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Mangkosoebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE

- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Musgrave, Richard A. 1989. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. Jakarta : Erlangga.
- Nicholson ,Walter. 2001. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, Y.S. 2005. *Analisis Disparatis Pendapatan kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Paralel Session IVA : Urban dan Regional. Kampus UI, Depok.
- Prayitno, Hadi. 1986. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Raharjo, Adi. 2006. *Jurnal : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Siti Aisyah T, 2000, *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Santoso, Purbayu Budi, dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel Dan SPSS*. Semarang : BP Undip
- Sari, Dini Devita. 2010. *Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sofyardi. 2005. *Analisa Regresi Logistik Dalam Ilmu Ekonomi*. Makalah Pelatihan Pengajaran Untuk Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 4.* Yogyakarta : BPFE

Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Jakarta : Erlangga.

Todaro, P. Michael. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 9.* Jakarta : Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar



Lampiran 1

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Propinsi Sumatera Barat
Tahun 1995 – 2009

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
1995	4.328.200	-
1996	4.390.000	1,43
1997	4.451.300	1,40
1998	4.473.250	0,49
1999	4.541.970	1,54
2000	4.220.320	-7,08
2001	4.234.510	0,34
2002	4.375.078	3,32
2003	4.456.816	1,87
2004	4.528.242	1,60
2005	4.603.957	1,67
2006	4.632.152	0,61
2007	4.697.800	1,42
2008	4.763.100	1,39
2009	4.827.973	1,36

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar dalam Angka



Lampiran 2

Tabel Tabel 4.2 :
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Sumatera Barat Tahun 1995 – 2009

No	Tahun	PDRB Harga Konstan 2000 (000 rupiah)	Pertumbuhan per tahun (%)
1	1995	21.571.699,420	-
2	1996	22.189.603,460	7,87
3	1997	23.323.502,710	5,11
4	1998	21.753839,980	- 6,73
5	1999	22.043.156,830	1,33
6	2000	22.889.614,050	3,84
7	2001	23.727.373,930	3,66
8	2002	24.840.187,760	4,69
9	2003	26.146.781,630	5,26
10	2004	27.578.136,560	5,47
11	2005	29.159.480,570	5,73
12	2006	30.949.945,100	6,14
13	2007	32.912.968,590	6,34
14	2008	35.007.921,570	6,37
15	2009	36.464.582,690	4,16
Rata – rata pertumbuhan per tahun			3,94

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar Dalam Angka



Lampiran 3 :

Tabel 4.3 :
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Tahun 1995 – 2009 (000 rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
1995	333.131.990
1996	369.969.250
1997	491.915.980
1998	509.711.920
1999	790.340.530
2000	832.500.300
2001	1.838.847.930
2002	2.625.628.430
2003	3.535.542.980
2004	3.641.715.050
2005	2.051.742.800
2006	6.782.311,880
2007	7.896.535.900
2008	10.099.593.540
2009	10.454.551.960

Sumber : BPS Sumatera Barat, Sumbar dalam Angka



Lampiran 4 :

Tabel 4.4 :

**Perkembangan Realisasi Investasi Swasta PMDN dan PMA
Propinsi Sumatera Barat Tahun 1995 – 2009 (000 Rupiah)**

Tahun	Investasi swasta PMDN	Investasi Swasta PMA	Total Investasi (PMDN + PMA)
1995	256.046.800	93.457.844	349.504.644
1996	204.090.910	73.034.148	277.125.058
1997	421.169.810	129.750.480	550.920.290
1998	685.383.230	339.337.125	1.024.720.355
1999	348.030.020	576.193.400	924.223.420
2000	187.773.150	588.413.375	776.186.525
2001	183.978.140	1.118.936.000	1.302.914.140
2002	348.234.000	1.059.845.940	1.408.079.940
2003	204.464.890	248.354.635	452.819.525
2004	631.733.330	274.352.280	659.168.558
2005	607.061.370	841.133.440	1.448.194.810
2006	234.857.820	788.555.460	313.713.360
2007	58.511.000	65.866.416	124.377.416
2008	608.918.000	224.720.270	631.390.027
2009	761.618.000	196.356.882	957.974.882

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka dan Laporan BKPM, data diolah



Lampiran 5 :

Tahun	Y	GE	Is	Log Y	Log GE	Log Is
1995	21,571,699,420	333,131,990	349,504,644	10.3339	8.5226	8.5435
1996	22,189,603,460	369,969,250	277,125,058	10.3461	8.5682	8.4427
1997	23,323,502,710	491,915,980	550,920,290	10.3678	8.6919	8.7411
1998	21,753,839,980	509,711,920	1,024,720,355	10.3375	8.7073	9.0106
1999	22,043,156,830	790,340,530	924,223,420	10.3433	8.8978	8.9658
2000	22,889,614,050	832,500,300	776,186,525	10.3596	8.9204	8.8900
2001	23,727,373,930	1,838,847,930	1,302,914,140	10.3752	9.2645	9.1149
2002	24,840,187,760	2,625,628,430	1,408,079,940	10.3952	9.4192	9.1486
2003	26,146,781,630	3,535,542,980	452,819,525	10.4174	9.5485	8.6559
2004	27,578,136,560	3,641,715,050	659,168,558	10.4406	9.5613	8.8190
2005	29,159,480,570	2,051,742,800	1,448,194,810	10.4648	9.3121	9.1608
2006	30,949,945,100	6,782,311,880	313,713,360	10.4907	9.8314	8.4965
2007	32,912,968,590	7,896,535,900	124,377,416	10.5174	9.8974	8.0947
2008	35,007,921,570	10,099,593,540	631,390,027	10.5442	10.0043	8.8003
2009	36,464,582,690	10,454,551,960	957,974,882	10.5619	10.0193	8.9814

Keterangan :

Y = pertumbuhan ekonomi

GE = pengeluaran pemerintah

Is = investasi swasta (PMDN dan PMA)

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT PDRB
/METHOD=ENTER Pengeluaranpemerintah Investasiswasta
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED )
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) .

```

Regression

[DataSet1] C:\Program Files\SPSS Evaluation\the last.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PDRB	10.41971	.078850	15
Pengeluaranpemerintah	9.27775	.531692	15
Investasiswasta	8.79105	.301202	15

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Investasiswasta, Pengeluaranpemerintah(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PDRB

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.932 ^a	.869	.847	.030864	.869	39.686	2	12	.000	1.652

a. Predictors: (Constant), Investasiswasta, Pengeluaranpemerintah

b. Dependent Variable: PDRB

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.076	2	.038	39.686	.000(a)
	Residual	.011	12	.001		
	Total	.087	14			

a Predictors: (Constant), Investasiswasta, Pengeluaranpemerintah

b Dependent Variable: PDRB



Coefficients^a

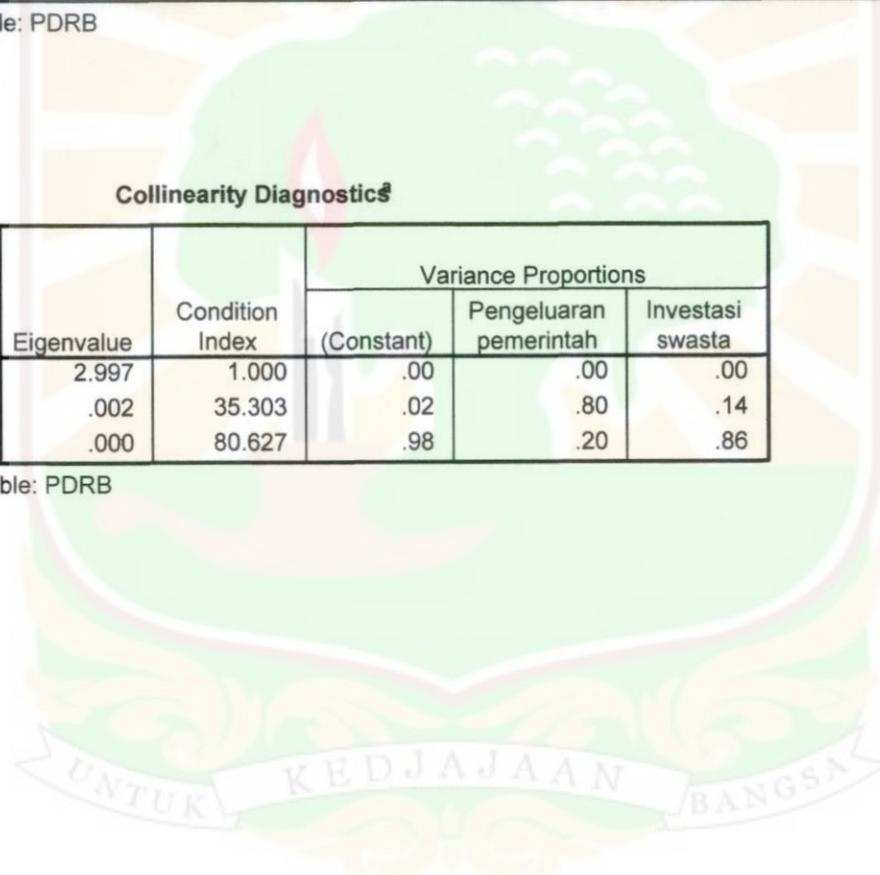
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		5% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.358	.291		32.125	.000	8.723	9.993		
	Pengeluaran pemerintah	.137	.016	.921	8.772	.000	.103	.170	.994	1.006
	Investasi swasta	-.023	.027	-.089	-.849	.413	-.083	.037	.994	1.006

a. Dependent Variable: PDRB

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pengeluaran pemerintah	Investasi swasta
1	1	2.997	1.000	.00	.00	.00
	2	.002	35.303	.02	.80	.14
	3	.000	80.627	.98	.20	.86

a. Dependent Variable: PDRB

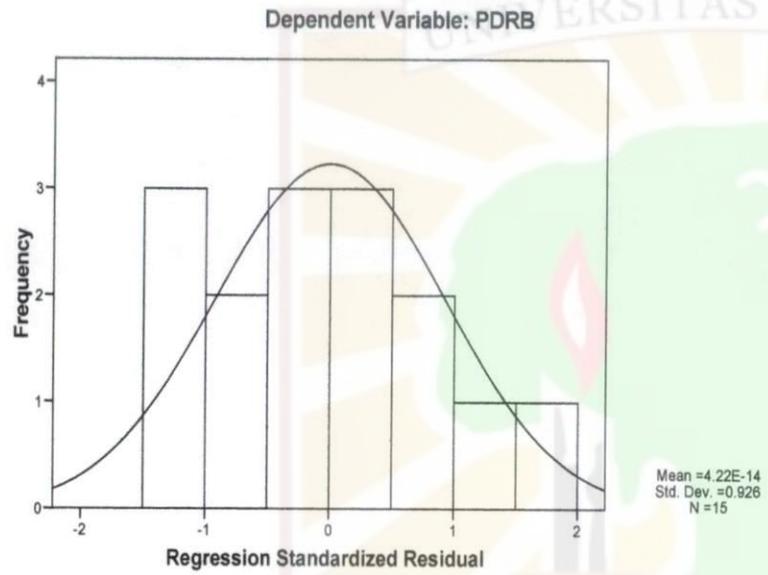


Correlations

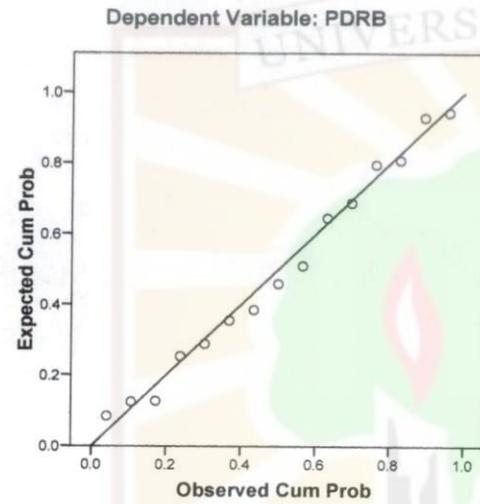
		PDRB	Pengeluaran pemerintah	Investasi swasta
Pearson Correlation	PDRB	1.000	.928	-.163
	Pengeluaran pemerintah	.928	1.000	-.080
	Investasi swasta	-.163	-.080	1.000
Sig. (1-tailed)	PDRB	.	.000	.281
	Pengeluaran pemerintah	.000	.	.388
	Investasi swasta	.281	.388	.
N	PDRB	15	15	15
	Pengeluaran pemerintah	15	15	15
	Investasi swasta	15	15	15



Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: PDRB

